



PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Oktarini Khamilah Siregar¹⁾, Junawan²⁾

¹⁾Magister Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indoensia

²⁾Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi,
Indonesia²

Abstrak

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau negara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui dua faktor yaitu tingkat pengangguran (ketimpangan tenaga kerja) dan tingkat kemiskinan (ketimpangan pendapatan). Selama masa covid19 pemerintah daerah mengalami penurunan kesejahteraan masyarakat secara dratis. Indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain dari segi makroekonomi perlu untuk diteliti dari segi financial. Tujuan penelitian ini untuk menguji Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Metode penelitian dengan pendekatan asosiatif kausal dengan data panel. Sampel penelitian berupa data panel dari 32 Pemerintah Kota dan Kabupaten selama tahun 2019 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menggunakan Model Fixed Effect, menunjukkan hasil secara parsial bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Kebijakan Pemerintah daerah sangat perlu dilakukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah seperti membuat pembayaran pajak dan retribusi daerah secara sistem online, karena kemajuan teknologi sepenuh digunakan dalam memperbaiki manajemen keuangan daerah pemerintah Kota dan Kabupaten demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhir mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

*Correspondence Address : oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i5.2022.1933-1944

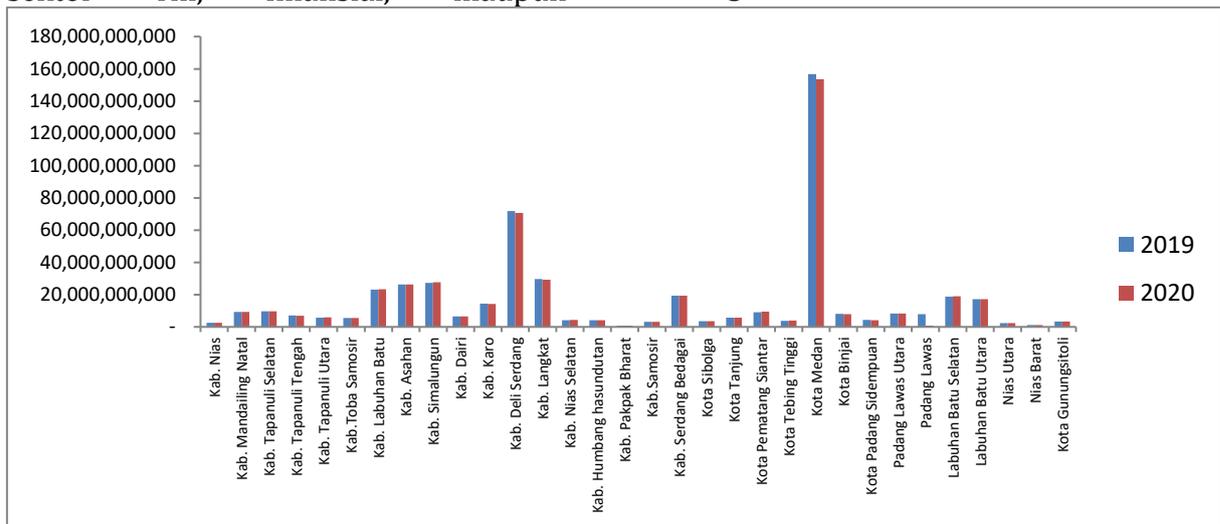
© 2022UM-Tapsel Press

Kata Kunci: Rasio Keuangan Daerah , PDRB Harga Berlaku dan Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan berfokus pada sektor strategis dan potensial pada wilayah baik sektor riil, finansial, maupun

infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berikut gambar Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara sebagai berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020

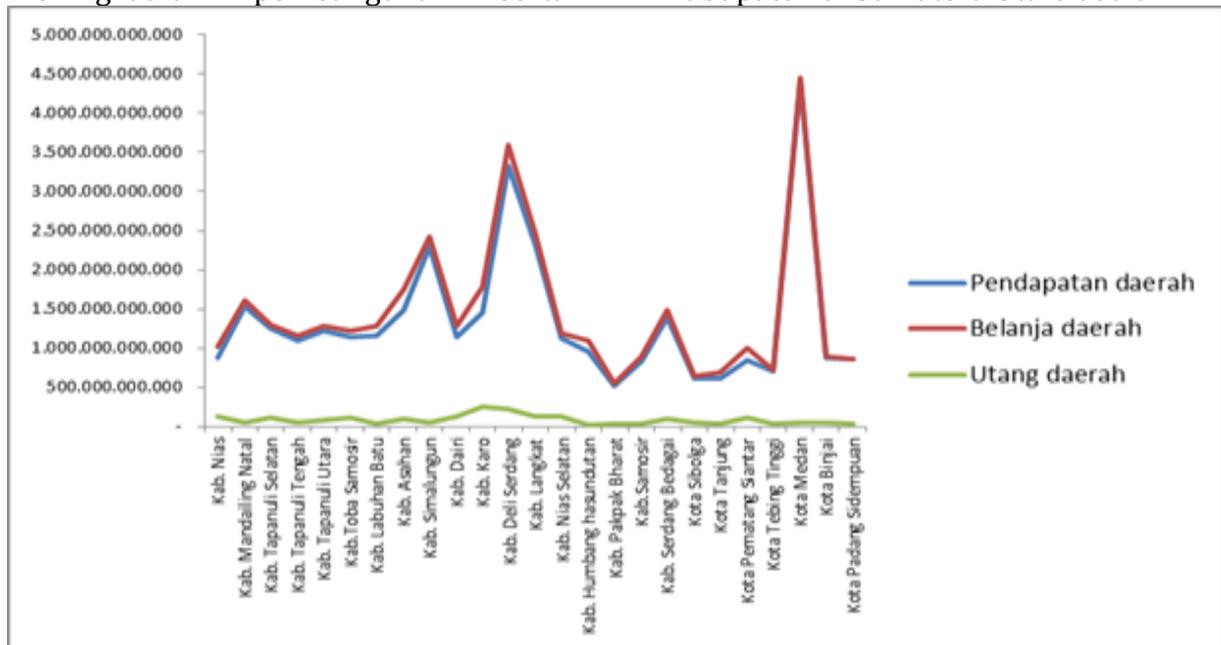
Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki perbedaan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terdapat pada pemerintah Kota Medan sebesar 156.780.580.000 tahun 2019 dan 153.669.830.000 tahun 2020. Hampir 50% dari jumlah 32 Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara bahwa PDRB dalam harga konstan masih banyak yang

rendah. Sadono (2008) menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu : a. Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), b. Produk Domestik Bruto Perkapita/Pendapatan Perkapita. dan c. Pendapatan Per Jam Kerja.

Terjadi ketimpangan yang tidak merata pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Utara. Salah satu penyebabnya adalah letak geografis setiap daerah

berbeda dan penggalian potensi daerah untuk setiap daerah berbeda karena rendahnya sumber daya manusia daerah tersebut. Sehingga pembangunan setiap daerah tidak merata akibat tidak terpantau oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada motivasi pemerintah kota dan kabupaten dalam meningkatkan pembangunan serta

pemerintah tersebut jauh dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Maka untuk itu setiap daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerahnya agar pembangunan daerah semakin meningkat. Berikut ini gambar Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Utang Daerah pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara adalah



Sumber : BPS, 2022

Gambar 1.2 Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Utang Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020

Pada Gambar 1.2 bahwa terjadi perbedaan pendapatan, belanja dan utang daerah pada pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Utara. Belanja, Pendapatan dan Utang daerah yang paling besar terdapat pada pemerintah Kota Medan, Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan sisanya Belanja, Pendapatan dan Utang daerah pada pemerintah kabupaten dan kota lainnya berada dibawah $\pm 2.500.000.000.000$. Terlihat jelas bahwa dengan besarnya Belanja, Pendapatan dan Utang daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya untuk pemerintah Kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara. Akan tetapi besarnya belanja sama dengan pendapatan pemerintah kabupaten dan kota di

Sumatera Utara maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya untuk pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan

berubah lebih baik atau buruk. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana transfer yang digunakan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti insfrastuktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya jumlah pengangguran. Tujuan penelitian adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio belanja

daerah terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap PDRB, PDRB dalam harga konstan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara .

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui dua faktor yaitu tingkat pengangguran (ketimpangan tenaga kerja) dan tingkat kemiskinan (ketimpangan pendapatan). Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. (Fahrudin, 2012). Menurut Prabawa (1988) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu tata

kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rambe, 2011). Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

Perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan

melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RaKemKD) :

= (Pendapatan Asli Daerah / Transfer pusat + Propinsi + Pinjaman) x 100%

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau propinsi.

Rumus Rasio Ketergantungan keuangan daerah (RaKetKD)

= (Pendapatan Transfer / Total Pendapatan daerah) x 100%

c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio dengan melihat kinerja pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Jika pertumbuhan pendapatan bersifat positif maka cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Rumus Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (APPD)

= Pendapatan Daerah Thn (t) - Pendapatan Daerah Thn (t-1) / Pendapatan Daerah Thn (t)

d. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB (RBDPDRB)

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

Rumus Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB = Total realisasi Belanja Daerah / Total PDRB

e. Rasio Utang Terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PDRB

dalam harga konstan. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan produktivitas yang dimiliki daerah.

Rumus Rasio Utang terhadap PDRB = Total Utang Daerah / PDRB

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah hubungan kausal. Pendekatan dengan ruang lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara dengan tujuan dapat diketahui kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian dilakukan dengan fakta untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan di 32 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara selama periode penelitian tahun 2019 sampai dengan 2020. Metodologi

digunakan berupa pendekatan analisis kuantitatif yang digunakan untuk melihat dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah, laju PDRB dalam harga berlaku dan Kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan Regresi Berganda dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan menggunakan program Eviews. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LnKM} = \beta_0 + \beta_1 \text{RaKemKD} + \beta_2 \text{RaKetKD} + \beta_3 \text{APPD} + \beta_4 \text{RBDPDRB} + \beta_5 \text{RUPDRBD} + \beta_6 \text{LnPDRB} + e \dots (2)$$

Keterangan: LnPDRB (Ln Produk Domestik Regional Bruto dalam harga konstan), RaKemKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah), RaKetKD (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah),

APPD (Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah), RBDTPDRB (Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB) Dan RUPDRB (Rasio Utang terhadap PDRB).

Kemudian dilakukan pengujian kualitas data untuk menentukan model dalam data panel. Model data panel terdiri dari common effect model, fixed effect model dan random effect model. Uji kualitas data yaitu uji chow, uji hausman dan uji langra multiplier. Dan terakhir dengan pengujian hipotesis yaitu uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Kualitas Data

Dalam analisis data panel maka tahap pertama adalah melakukan pemilihan model terbaik dari ketiga model yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman untuk memperkuat hasil pengujian bahwa model terpilih memang model yang terbaik.

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara FEM atau CEM. Hasil Uji Chow adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel dengan Chow Test Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara

KM	
Uji Chow Statistik	Probabilitas cross-section chi-square
31	0,0000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 1 bahwa nilai uji chow statistic sebesar 31 dengan nilai prob.cross-section chi-square sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan FEM lebih tepat dibandingkan dengan CEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara FEM atau REM. Hasil Uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel dengan Hausman Test Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara,

KM	
Uji Hausman	Probabilitas cross-
6	0.0000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 2 bahwa nilai statistik uji hausman sebesar 6 dengan nilai prob cross-section random sebesar 0.0000 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat, dan tidak perlu dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier (LM)*.

b. Regresi Data Panel

Setelah diketahui ternyata dalam penelitian ini menggunakan model *fixed effect (FEM)*, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi data panel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Model Fixed Effect Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara dengan Ln Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel dependen

Variabel	Coefisien	T	Probabilitas
Constanta	-1.7026	-2.592 (0.6566)	0,015
RaKemKD (X ₁)	-2.5351	-7.2886*** (0.3478)	0.000
RaKetKD (X ₂)	0.1407	0.5987* (0,2350)	0.554
APPD (X ₃)	0.0584	1.0176* (0,0574)	0.318
RBDTPDRB (X ₄)	0.093	0.2002* (0,4657)	0.842
RUPDRB (X ₅)	18.102	6.7205*** (2.6935)	0.000
LnPDRB (X ₆)	0.526	4.0682*** (0.1293)	0.000

Sumber: Data diolah, 2022

Angka dalam kurung adalah standart error, *** $p < 1\%$, ** $p < 5\%$ dan * $p < 10\%$

Kemudian akan diperoleh hasil regresi data panel dengan Model *Fixed Effect* maka persamaan regresi sebaagi berikut:

$$\text{LnPDRB} = -1.7026 - 2.5351 \text{ RaKemKD} + 0.1407 \text{ RaKetKD} + 0.0584 \text{ APPD} + 0.093 \text{ RBDTPDRB} + 18.102 \text{ RUPDRB} + 0.526 \text{ Ln PDRB}$$

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)

F-Statistic	Probabilitas (F-
277.9604	0.000000

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil Eviews dengan Model *Fixed Effect* (FEM) maka diperoleh F-hitung sebesar 277.9604, dengan tingkat probabilitas 0.000000. Dengan demikian disimpulkan, $p = 0.000000 < \alpha = 0.05$, bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

b.Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel tersebut adalah

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t), Model 2

Variabel	T	Probabilitas
Constanta	-2.592 (0.6566)	0,015
RaKemKD (X ₁)	-7.2886*** (0.3478)	0.000
RaKetKD (X ₂)	0.5987* (0,2350)	0.554
APPD (X ₃)	1.0176* (0,0574)	0.318
RBDTPDRB (X ₄)	0.2002* (0,4657)	0.842
RUPDRB (X ₅)	6.7205*** (2.6935)	0.000
LnPDRB (X ₆)	4.0682*** (0.1293)	0.000

Sumber: Data diolah, 2022

Angka dalam kurung adalah standart error, *** $p < 1\%$, ** $p < 5\%$ dan * $p < 10\%$

Hasil uji parsial dalam penelitian ini adalah Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X₁) dengan t-hitung sebesar -7.2886 dengan tingkat probabilitas 0,000. Maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel

Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2) dengan t-hitung sebesar 0.5987 dengan tingkat probabilitas 0.554. Maka Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (X_3) dengan t-hitung sebesar 1.0176 dengan tingkat probabilitas 0.318. Maka Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (X_4) dengan t-hitung sebesar 0.2002 dengan tingkat probabilitas 0.842. Maka Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (X_5) dengan t-hitung sebesar 6.7205 dengan tingkat probabilitas 0.000. Maka Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_6) dengan t-hitung sebesar 4.0682 dengan tingkat probabilitas 0.000. Maka Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. adalah

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi, Model 2

R Squared	Adjusted R Squared
0.9975	0.9939

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 6, bahwa diperoleh nilai R Squared sebesar 0,9975 dan nilai Adjusted R Squared sebesar 0,9939. Hal ini menunjukkan bahwa 99,39 % variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara sedangkan sisanya 0,61 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti variabel keuangan daerah yaitu Dana Perimbangan, IPM, dan Pendapatan Per kapita.

PEMBAHASAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang ada, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang dirumuskan oleh aparatur desa dengan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Kota dan kabupaten, Sumatera Utara masa covid-19 mengalami penurunan. Untuk itu peneliti ingin menguji indikator yang mempengaruhi dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data panel bahwa hasil kualitas data penelitian ini dengan model *fixed effect*. Maksudnya 32 pemerintah kabupaten

dan kota di Sumatera Utara memiliki kesejahteraan masyarakat yang tidak terlalu berbeda di masa sebelum covid19 dan masa covid 19, mereka sama-sama mengalami penurunan kesejahteraan masyarakat

Untuk hasil statistik secara parsial bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada 32 Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan Suryaningsih (2015) dan Pratiwi (2019) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena kemandirian keuangan daerah yg masih rendah merupakan dampak dari kesejahteraan masyarakat yang tidak optimal ditambah lagi pemerintah daerah mengalami bencana pademik covid19. Kemudian Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya karena itu berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat sehingga mengurangi penduduk miskin. Selama Covid19 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengalami penambahan penduduk miskin karena masyarakatnya kehilangan pekerjaan akibat aturan pemerintah yang mengurangi aktivitas bekerja tidak boleh terlalu banyak karena wabah penyakit covid19. Selanjutnya Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada

Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

Berbeda hasilnya dengan Luqman dkk (2011) PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dalam penelitian ini pemerintah kabupaten dan kota masih tinggi ketergantungan keuangan daerah sehingga belum bisa mandiri akibat pengelolaan pendapatan asli daerah yang masih minim. Pembangunan di daerah tersebut masih sedikit artinya pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pembangunan daerah masih belum merata sehingga dana dari pajak daerah tidak cukup memenuhi belanja daerah.

Pendapatan daerah di 32 pemerintah kabupatendan kota mengalami kemerosotan atau tidak tercapai target pendapatan. Pemerintah daerah belum optimal melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online, itu salah satu dampak pendapatan tidak tercapai. Orang takut keluar rumah untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah atau mengurangi aktivitas diluar rumah yang merupakan kebijakan pemerintahpusat dan daerah. Sehingga pendapatan daerah di masa pademik covid19 tidak dapat memenuhi belanja daerah, dimana belanja daerah pada masa covid19 lebih optimal di distribusikan ke belanja kesehatan. Belanja infrastruktur, belanja pendidikan masa itu tidak optimal dilaksanakan karena sedikit yang bisa terpenuhi akhirnya perputaran dalam menghasilkan pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak tercapai. Ada beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak memiliki utang kepada daerah lain maka karena kondisi covid19 mengalami penambahan utang seperti pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dan Simalungun. Pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara masih belum berhasil dalam otonomi daerah,

maksudnya masih tergantung kepada pusat berupa dana transfer karena minimnya pendapatan daerah yang didapat. Disisi lain alokasi dana pembangunan yang tersedia relatif terbatas maka pemerintah harus dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah harus dapat menumbuhkan investasi baru seluruh daerah pemerintah Kota dan kabupaten di Sumatera Utara melalui pengalokasi dana penerimaan seperti pendapatan dan belanja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kemudian akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPILAN

Berdasarkan hasil Hasil dan analisis, maka peneliti menyimpulkan menggunakan Model Fixed Effect dengan data panel. Secara parsial bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Menyarankan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara harus dapat mengikuti kemajuan teknologi seperti menggunakan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem digital, karena Peraturan pemerintah sudah mengizinkan untuk melakukan transaksi secara online. Ini sangat membantu jika daerah mengalami bencana wabah penyakit covid19 atau tidak mengalami lagi harus tetap

menggunakan teknologi agar tercapai keseimbangan kinerja pemerintah yaitu 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif). Dan Membuat kebijakan pengawasan untuk pencapaian target pendapatan daerah dengan memberikan apresiasi bagi ASN daerah yang berhasil memenuhi target pendapatan daerah secara optimal. Serta pemerintah daerah dapat memulihkan kondisi belanja daerah yang berkontribusi kearah pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Fincy (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Gini. Tesis. Pasca Sarjana Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Agus Tri Basuki dan Imamudin Y .(2015). *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2009-2018*, Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik regional Bruto Kabupaten Kota, Indonesia Tahun 2009-2018*, Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Dian Sudrajat. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten bandung Barat*. Universitas Pasundan.
- I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawin. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi BALI Tahun 2006 s.d 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*

Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Greydi N.S, Paulus.K dan Tri Oldy.R (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Kumpangpune. Noni, Saerang. David P.E, Engka. Daisy S.M. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung*. Volume 20 No.3. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*

Kuznets (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Luqman Khakim, Iwan Hermawan, Achmad Solechan, dan VS Tripriyo PS.(2011). *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.

Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mankiw. (2006). *Makro Ekonomi* :Penerbit Erlangga.

Mardiasmo.(2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI

Marijana Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. *Institute of Public Finance, Zagreb*.

Magdalena Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals*. *The College of Economics and Social Sciences in Płock*. *Warsaw University of Technology Płock, Poland*.

Ni Nyoman.S, Made.S.U dan LN. Mahendra Yasa. (2015). *Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. ISSN: 2337-3067.

Ni Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra.(2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan*

Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556 .

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putong, Iskandar. (2003). *Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Pratiwi. Rengkar (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo Di Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi-Stie Mahardhika Surabaya. <http://Repository.Stiemahardhika.Ac.Id/2271/3/16310430%20%20JURNAL%20RENGKAR%20PRATIWI.Pdf>.

Sukirno, Sadono. (2008). *Teori Pengantar Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.

Suryaningsih. Ni Nyoman, Utama, Made Suyana Dan Yasa. I.N.Mahendra (2015). *Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4.08. SSN : 2337-3067.

Ulum, Ihyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. www.bps.go.id